

Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk Mewujudkan Desa Mandiri pada BUMDes Dana Asri Sejahtera Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember

¹Ni Nyoman Putu Martini G,²Yulinartati.

Univeritas Muhammadiyah Jember

e-mail: ¹ninyomanputu@unmuhjember.ac.id, ²yulinartati@unmuhjember.ac.id

Diterima: Maret 2022; Dipublikasikan: Agustus 2022

Abstrak

Pemerintah Desa dalam rangka meningkatkan perekonomian desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat pedesaan dengan cara mengoptimalkan sumber-sumber daya yang ada di sekitar Desa. Berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Desa dan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 maka Desa diberi kewenangan untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Namun seiring dengan berjalannya waktu tidak sedikit desa-desa yang gagal menjalankan usahanya, hal ini dikarenakan masih minimnya kemampuan sumber daya manusia yang ada dalam mengelola BUMDes tersebut. Dengan kondisi yang demikian, dirasa perlu memberikan pendampingan pengelolaan sumber daya manusia yang ada khususnya pengelolaan keuangan BUMDes agar BUMDes dapat mengelola keuangannya secara professional sesuai ilmu manajemen keuangan dan standar akuntansi yang berlaku umum. Demikian juga dengan BUMDes Dana Asri Sejahtera Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember dalam rangka menjadikan BUMDes sebagai usaha yang professional sehingga bisa mensejahterakan BUMDes. Diharapkan dengan sejahteranya BUMDes sejahtera pula masyarakatnya. Dengan demikian BUMDes yang sehat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berdampak pula pada kemandirian Desa

Kata Kunci: BUMDes, Pembangunan Desa Mandiri, Tata Kelola Keuangan, Ekonomi Kelembagaan,

Abstract

The village government in order to improve the village economy and improve the welfare of the community, especially rural communities by optimizing the resources around the village, based on the village government law and Government Regulation no.11 of 2021, villages are given the authority to form Village Owned Enterprises (BUMDes). However, as time goes by, many villages fail to run their business, this is due to the lack of human resource capabilities in managing the BUMDes. With this condition it is deemed necessary to provide assistance in the management of existing human resources, especially the financial management of BUMDes so that BUMDes can manage their finances professionally according to financial management science and accounting standards, as well as BUMDes Dana Asri Sejahtera Wonoasri Village, Tempurejo District, Jember Regency in order to make BUMDes a It is hoped that with a healthy BUMDes, it is hoped that with the prosperity of BUMDes, the community will be prosperous.

Keywords: BumDes, Independent Village Development, Financial Governance, Institutional Economics.

Pendahuluan

Dalam Pembukaan UUD 1945 mengamanahkan untuk mensejahterakan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia, untuk mewujudkan amanah tersebut yang merupakan cita-cita luhur bangsa Indonesia salah satunya melalui pembangunan disegala bidang. Pembangunan disegala bidang tersebut dapat dimulai dari pemerintahan dengan skala terkecil yaitu pemerintahan desa. Desa merupakan skala pemerintahan terkecil yang memiliki peranan penting dalam upaya pembangunan nasional dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia cenderung bermukim di wilayah pedesaan sehingga berpengaruh yang cukup besar dalam upaya penciptaan stabilitas nasional (Sa'dullah, 2016). namun seiring perkembangan jaman dari tahun ke tahun jumlah penduduk desa banyak yang melakukan urban di perkotaan, tahun 2021 ini diproyeksikan oleh *Worldometers* jumlah penduduk perkotaan akan semakin meningkat mencapai kira-kira 56,4%, kondisi ini dikarenakan potensi yang dimiliki oleh pedesaan yang luas wilayahnya berbanding terbalik dengan luas wilayah perkotaan belum tergarap dengan baik. Disisi lain posisi desa dinilai memiliki posisi strategis dalam pembangunan negara karena desa menjadi dasar dalam identifikasi permasalahan masyarakat hingga pada perencanaan serta realisasi tujuan negara yang terdapat pada tingkat desa. (Sisik, 2015), Selain itu pula posisi desa dinilai strategis dalam pembangunan negara karena desa menjadi dasar dalam identifikasi permasalahan masyarakat hingga pada perencanaan serta realisasi tujuan negara yang terdapat pada tingkat desa (Sidik, 2015).

Sayutri (2011) mengemukakan bahwa keberadaan BUMDes diperlukan guna menggerakkan potensi desa serta dapat membantu dalam upaya pengentasan kemiskinan. Hal tersebut juga didukung oleh Hardijono dkk (2014) bahwa pendirian BUMDes merupakan jalan untuk membentuk ekonomi pedesaan yang mandiri sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Pengembangan BUMDes perlu dilakukan agar BUMDes yang telah berdiri dapat berfungsi sesuai dengan peranannya. Tujuan dan sasaran BUMDes dapat tercapai jika BUMDes dikelola secara terarah dan profesional.

Salah satu cara untuk mendorong dan mempercepat pembangunan desa adalah pemerintahan desa diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengelola secara mandiri lingkup desa melalui lembaga-lembaga ekonomi ditingkat desa. (Budiono, 2015). Hal ini sejalan dengan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menjelaskan desa dapat mendirikan badan usaha milik desa dengan kebutuhan dan

potensi desa. Kebutuhan dan potensi desa inilah yang menjadi dasar dalam pendirian BUMDes. (Edy Yusuf,2016). BUMDes merupakan modal sosial yang menjembatani upaya penguatan ekonomi pedesaan dan diharapkan menjadi solusi atas permasalahan pembangunan perekonomian pedesaan yang selalu gagal akibat intervensi pemerintah yang terlalu besar. Oleh sebab itu BUMDes merupakan badan hukum yang terpisah dari pemerintah desa dan bertujuan untuk membantu kemandirian ekonomi masyarakat desa dan pengelolaannya dilakukan sendiri oleh pemerintah desa dan masyarakat desa. Pembentukan dan pengelolaan BUMDes sangat bergantung pada kemampuan kepemimpinan kepala desa. Kepala desa menjadi tonggak dalam menggerakkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan masyarakat desanya dalam mewujudkan kemandirian desa melalui BUMDes.(Nana Mulyana dkk, 2018). Pengembangan BUMDes perlu dilakukan agar BUMDes yang telah berdiri dapat berfungsi sesuai dengan perannya. Selain pengembangan BUMDes perekrutan pengelola BUMDes terutama jabatan manajer haruslah orang-orang yang profesional, selain memiliki pengalaman pada lembaga yang memiliki orientasi profit usaha juga memiliki latar belakang pendidikan yang mumpuni agar mampu menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan pekerjaannya, dalam Undang-undang No. 4 tahun 2015 telah disebutkan bahwa kewajiban pelaksana yaitu melaksanakan dan mengembangkan BUMDes agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan pelayanan masyarakat desa, menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Desa serta melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian desa lainnya. Tujuan dan sasaran BUMDes dapat tercapai jika BUMDes dikelola secara terarah dan profesional. BUMDes merupakan solusi atas permasalahan-permasalahan yang terjadi di desa. (Edi Yusuf, 2016) BUMDes diharapkan dapat mendorong dan menggerakkan perekonomian desa (Ramadana dkk, 2013). Begitu pula dengan pembentukan BUMDes di desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Upaya peningkatan kesejahteraan BUMDes Dana Asri Sejahtera Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember selaku pelaku usaha di Kabupaten Jember, adalah dengan memperhatikan eksistensi usaha dengan baik dari berbagai aspek, sehingga tercapai tujuan yang diinginkan yaitu memperoleh laba. Salah satu aspek tersebut adalah manajemen keuangan, artinya bagaimana perusahaan dapat merencanakan, menentukan komposisi modal, menentukan investasi dana, mempertahankan likuiditas yang tepat,

pengelolaan surplus serta kontrol keuangan dan mampu melaksanakan fungsi-fungsi manajemen keuangan, dalam pengelolaan keuangannya harus berpegang pada prinsip manajemen keuangan yaitu prinsip konsistensi, akuntabilitas, transparansi, kelangsungan hidup, integritas dan standart akuntansi. (Surya, 2015)

Usaha profit oriented termasuk BUMDes yang baik dan sehat seharusnya memiliki laporan keuangan yang baik dan benar sesuai kaidah-kaidah pelaporan keuangan sehingga BUMDes dapat menilai perkembangan usahanya. Pelaporan keuangan yang benar akan menghasilkan laporan keuangan yang nantinya akan memudahkan BUMDes untuk mengakses bantuan permodalan. Sedangkan pelaporan keuangan yang kurang memadai akan mengakibatkan salah informasi keuangan yang dihasilkan sehingga keputusan yang diambil akan tidak tepat. Begitu juga dengan BUMDes Dana Asri Sejahtera Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember merupakan BUMDes yang sudah berjalan dan sudah mulai berkembang, untuk itu diperlukan pelatihan-pelatihan manajemen dalam mengelola BUMDes secara profesional salah satunya adalah pelatihan pembuatan dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen keuangan. Pelatihan pembuatan dan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen keuangan perlu dilakukan dengan serius hal ini dikarenakan peyelenggaraan pencatatan laporan keuangan yang benar guna menunjang keberhasilan BUMDes itu sendiri dalam menjalankan usahanya serta pertanggungjawabannya baik kepada internal maupun eksternal agar BUMDes benar-benar kredible

Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang biasa kita kenal dengan abdimas, di Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo tepatnya pada Bumdes Dana Asri Sejahtera dengan judul Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BumDes) untuk Mewujudkan Desa Mandiri Pada Bumdes Dana Asri Sejahtera Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember belum terlalu paham (belum *professional*) para pengelola dalam hal pengelolaan keuangannya, terutama dalam melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan yang benar sesuai standart akuntansi utamanya saat melakukan laporan pertanggungjawaban kepada desa melalui kepala desa setempat, apalagi Bumdes Dana Asri Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo memiliki unit-unit usaha dengan perputaran

keuangan yang tidak sedikit jumlahnya, Oleh sebab itu agar pengelola memiliki pengetahuan dan pemahaman pengelolaan keuangan sesuai standart akuntansi maka pengabdian menawarkan untuk melakukan pelatihan penyusunan laporan keuangan beserta buku pedoman pengelolaan keuangan Bumdes. Pelatihan dan pembinaan dilaksanakan di Kantor Bumdes Dana Asri Sejahtera Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo dengan penyampaian materi yang dilakukan oleh pengabdian secara berkelompok yang beranggotakan 2 orang. Adapun penyampaian materi dilakukan secara langsung bertatap muka selama delapan kali tatap muka, setelah peserta memahami secara teori pengelolaan keuangan Bumdes sesuai standart akuntansi maka dilanjutkan dengan pendampingan, pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan kadang dilakukan secara langsung kadang dengan cara daring, buku pedoman dibuat oleh pengabdian secara berkelompok dengan mendasarkan pada hasil survey lapangan serta mengacu pada peraturan-peraturan yang sesuai dan mendukung terhadap pedoman pengelolaan BUMDes.

Hasil Kegiatan

Kegiatan pengabdian masyarakat yang kadang disingkat dengan abdimas pada BUMDes Dana Asri diawali pelaksanaan pada tanggal 03 November 2021 dan berakhir sampai selesai pendampingan sampai dengan pertengahan bulan Desember 2021, kegiatan ini bekerja sama dengan Direktur Utama Bumdes Dana Asri Sejahtera, tujuan kegiatan ini adalah agar bagian keuangan Bumdes dapat menyusun laporan keuangan secara professional sesuai standart akuntansi, sehingga Bumdes dapat memiliki kredibilitas yang tinggi dan berdampak pula terhadap kelangsungan Bumdes itu sendiri dan harapannya menjadi salah satu tonggak ekonomi masyarakat desa dan lebih luas lagi menjadi tiang ekonomi masyarakat menuju kemandirian baik kemandirian masyarakat maupun kemandirian desa. Pengabdian melaksanakan abdimas dengan menggunakan metode pelatihan atau kepakaran, selain menggunakan metode kepakaran pengabdian juga melakukan evaluasi, diskusi dan monitoring kemampuan bagian keuangan sampai benar-benar professional. Tabel berikut mencerminkan kondisi sebelum dan setelah pelaksanaan masyarakat.

Tabel Kondisi Sebelum dan Setelah Pengabdian Masyarakat

| Prinsip Manajemen Keuangan | Kondisi Sebelum PKM | Kondisi Setelah PKM |
|----------------------------|--|---|
| Prinsip Konsistensi | Dalam pengelolaan keuangan belum dilakukan secara konsisten | Dalam Pengelolaan keuangan dilakukan secara konsisten dan tidak berubah-ubah bahkan disaat kondisi yang tidak pasti (<i>uncertainty</i>) |
| Prinsip Akuntabilitas | Pengelola belum begitu memahami gambaran hukum dan moral mengenai penggunaan dana atau kewenangan yang diberikan dalam mengelola keuangan | Pengelola mulai memahami tentang gambaran hukum formal dan non formal mengenai penggunaan dana ataupun kewenangan yang diberikan dalam mengelola keuangan sehingga ada pertanggung jawaban menggunakan keuangan |
| Prinsip Transparansi | Pihak pengelola terkadang masih belum mampu memberikan informasi mengenai kegiatan pengelolaan keuangan kepada public, hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan sumber daya manusia | Pihak pengelola mampu memberikan informasi kegiatan pengelolaan keuangan kepada public |
| Prinsip Kelangsungan Hidup | Pihak pengelola masih belum mampu memberikan gambaran terhadap kesehatan keuangan BUMDes utamanya untuk memprediksikan kesehatan keuangan pada jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang | Pengelola mampu memberikan gambaran kesehatan keuangan BUMDes dan mampu mempredikai kesehatan keuangan jangka pendek, menengah dan jangka panjang |
| Prinsip Integritas | Belum semua personal yang terlibat dalam BUMDes mampu menunjukkan integritasnya dengan tolok ukur kemampuan menyajikan laporan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai prinsip-prinsip akuntansi | Semua personal telah mampu memnunjukkan integritasnya dengan tolok ukur mampu menyajikan laporan keuangan sesuai standart akuntansi |
| Prinsip Standar Akuntansi | Belum mampu mengelola BUMDes sesuai prinsip-prinsip akuntansi dan sesuai dengan standart akuntansi | Pengelola mampu mengelola BUMDes sesuai dengan standart akuntansi |

Sumber : BUMDes Dana Asri Sejahtera & diolah (2021)

Kesimpulan dan Saran

Dari hasil kegiatan abdimas dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Peserta abdimas sangat antusias dengan kegiatan ini terbukti dengan banyaknya pertanyaan kepada pemateri pada saat pelaksanaan pelatihan dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengilustrasikan soal-soal praktek yang diberikan oleh pengabdian.
- b. Peserta mengalami kemajuan pertambahan ilmu yang awalnya hanya memahami pengelolaan keuangan secara otodidak namun dengan adanya pelatihan sudah mampu membuat laporan pengelolaan keuangan sesuai dengan standart akuntansi
- c. Pengabdian menyusun buku pedoman pengelolaan Bumdes yang diberikan sebagai pedoman bagi pengelola BUMDes Dana Asri Sejahtera Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo

Saran.

Kegiatan pelatihan pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan Bumdes merupakan kegiatan yang sangat penting bagi pengelola Bumdes utamanya pada bagian keuangan maka diharapkan kegiatan ini berkelanjutan serta dapat menghasilkan dan mendukung program pemerintah desa agar menjadi desa mandiri, maju dan tangguh demi kesejahteraan masyarakat seluruh desa

Daftar Pustaka

- Budiono, P. (2015). *Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Bojonegoro (Studi di Desa Nginginrejo Kecamatan Kalitidu dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor)*. *Jurnal Politik Muda*, 4(1), 116-125.
- Dwi Hadya Jayani, diunduh pada tanggal 12 November 2020 jam 22.01 Databoks
- Edy Yusuf Agunggunant Fitri Arianti dan Edi Wibowo Kushartono Darwanto, *Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, Unisnu Jepara, Vol 13, 01 Maret 2016
- Gatot Murdjito, *Metode Pengabdian Pada Masyarakat*, 2012
- Hardijono, R., Maryunani, Yustika, A.E., & Ananda, C.F., (2014). *Economic Independence of The Village Through Institutional Village Enterprises (BUMDes)*. *IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF)*, 3(2), 21-30.
- Kurnia, Dadang. 2015. *Pengawasan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa* Jakarta: BPKP.
- Nana Mulyana,,Anisa Utami & Simon Sumanjoyo Hutagalung *Prosiding Seminar Nasional Penerapan IPTEKS Politeknik Negeri Lampung 08 Oktober 2018 ISBN 978-602-5730-68-9 halaman 172-177* <http://jurnal.polinela.ac.id/index.php/SEMTEKS>
- Ramadana, C.B., Ribawanto, H., & Suwondo. (2013). *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi Di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)*. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(6), 1068-1076.
- Republik Indonesia. 2014. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Sayutri, M. (2011). *Pelebagaian Badan Usaha Milik Desa (BUMDs) sebagai penggerak Potensi Ekonomi Desa dalam Upaya pengentasan Kemiskinan di Kabupaten*
- Sa'dullah (2016). *Pentingnya Media Audio Visual dalam Pengembangan Kawasan Perdesaan Agropolitan*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Available: <http://www.kemendes.go.id/index.php/view/detil/1799/pentingnya-media-audio-visual-dalam-pengembangan-kawasan-perdesaan-agropolitan>. Accessed 18 July 2016.
- Sidik, F. (2015). *Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa*. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 19(2), 115-131
- Republik Indonesia. 2004. Undang-undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Desa